



**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA.....	2
A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Atas Penerapan Tata Kelola	2
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.....	2
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris	3
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.....	3
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	4
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.....	4
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	4
D. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	4
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	4
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	4
E. Hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR	4
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.....	4
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	4
F. Hubungan Keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	5
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	5
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	5
G. Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.....	5
H. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah	5
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun	6
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	6
K. Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>)	6
L. Permasalahan hukum yang dihadapi.....	6
M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.....	7
N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	7
BAB III PENUTUP	8

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Unisritama, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta nilai nilai etika yang berlaku pada industri Perbankan, maka Bank Unisritama wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan Tata Kelola yang baik sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12.SEOJK.03.2024 dan Peraturan Jasa Keuangan No.9.POJK.03.2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkeonomian Rakyat.

Penerapan Tata Kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Bank Unisritama. Hal ini dilakukan terus menerus dalam upaya meningkatkan implementasi prinsip prinsip Tata Kelola yang baik.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank Unisritama berpedoman pada Prinsip Tata Kelola yang meliputi 5 (lima) pilar yaitu :

1. **Transparansi (Transparency)**, adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (Accountability)**, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**, adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Independensi (Independency)**, adalah pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (Fairness)**, adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR, Bank Unisritama wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan memuat informasi mengenai

1. ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR
2. kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi
3. kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris
4. paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris
5. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
6. frekuensi rapat Dewan Komisaris
7. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah
8. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah;
9. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
10. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, baik nominal maupun penerima dana.

Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas kemudian disampaikan kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem pelaporan OJK
2. Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau (YLPI Riau)
3. Asosiasi BPR di Indonesia, dalam hal ini adalah PERBARINDO; dan
4. Pemangku kepentingan melalui situs web BPR, yakni pada bprunisritama.com

Bank Unisritama akan terus menerus berupaya untuk menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sehat, berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berlandaskan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang undangan yang berlaku.

BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. Bank Perekonomian Rakyat Unisritama
Alamat	Jl. Soekarno Hatta No. 3, Desa Kubang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Nomor Telepon	(0761) 63381
Penjelasan Umum	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian cukup dari Manajemen BPR.
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Hasil nilai komposit penilaian self assessment daripada penerapan tata kelola PT. BPR Unisritama adalah "3" (cukup baik)

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

No	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi	
1	Nama	Nancy Tahar
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan tanggung jawab	Membawahi fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta fungsi audit internal
2	Nama	Parhan
	Jabatan	Direktur
	Tugas dan tanggung jawab	Membawahi bagian operasional dan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan APU PPT PPPSPM
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
1. Realisasi laba bruto Desember 2024 Rp.1.221.170.196, tidak mencapai target RBB 2024 sebesar Rp. 1,541,949,032;		
2. Penyaluran kredit pada sektor sawit tercapai dengan pencairan pada Mei 2024 sebesar Rp.3.200.000.000,- tetapi kredit sepeda motor listrik tidak terealisasi;		
3. Persiapan penerapan SAKEP per 1 Januari 2025 telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Vendor Core Banking System (CBS) PT. Gurindam Fajar Sinergi serta penyiapan infrastruktur seperti Kebijakan dan Prosedur CKPN dan SDM BPR;		
4. Perubahan nama BPR menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Unisritama ditetapkan melalui RUPS serta disahkan melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0026098.AH.01.02 pada 3 Mei 2024;		
5. Belum terlaksananya penambahan petugas posting amprah, tetapi telah difungsikan satu Teller dan kepala kantor kas untuk fokus menjaga layanan posting amprah honor/gaji paling lambat dua hari kerja;		
6. Telah dijalankan penerapan program APU PPT PPPSPM sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada menjalankan kewajiban pelaporan kepada PPATK dan OJK;		
7. Telah ditindaklanjuti hasil pemeriksaan umum OJK 2023 dan 2024, akan tetapi masih terdapat beberapa temuan berulang yang belum diselesaikan;		
8. Belum terlaksananya maintenance kredit ke sektor sawit berupa kunjungan rutin bulanan ke KUD, akan tetapi maintenance dan pembayaran kredit sawit dilakukan melalui mitra Unisritama pada kelompok petani sawit;		
9. telah dilakukan upaya peningkatan penghimpunan dana didalam captive market dengan tercapainya DPK Rp34.304.580.255 diatas target RBB 2024 Rp. 34.150.551.160. akan tetapi peningkatan DPK diluar captive market belum terlaksana dengan maksimal. insentif penghimpunan dana belum ditetapkan;		
10. Action plan penanganan kredit bermasalah, mapping penyebab kredit bermasalah, laporan pemantauan tunggakan secara harian, dan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah telah dilaksanakan dengan memanfaatkan kerjasama dengan Kantor Hukum dan penyelesaian melalui jalur hukum/litigasi, akan tetapi peningkatan NPL belum teratasi dengan efektif.		

11. Draft serta simulasi skala upah dengan mematuhi UMP terbaru belum terpenuhi,
12. Telah dilaksanakan upaya pemisahan tugas unit kerja pada fungsi keuangan dan pelayanan, seperti penutupan akses informasi saldo rekening oleh teller. akan tetapi, pelaksanaan penarikan uang pada bank lain masih melibatkan CS akibat keterbatasan jumlah SDM. Kebijakan rolling karyawan CS-Teller belum terpenuhi;
13. Penegasan keputusan rencana perubahan kegiatan usaha dari BPR Unisritama menjadi BPRS Unisritama ditetapkan pada RUPS LB 2025,
14. Terobosan baru produk simpanan belum terlaksana;
15. Pengumuman kepada seluruh mahasiswa UIR terkait layanan pembayaran uang mahasiswa UIR melalui Bank Unisritama telah dilakukan melalui banner dan papan informasi pada jaringan kantor Bank.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi		
1	Nama	Rika Puspa Ayu
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan tanggung jawab	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
2	Nama	Eko Atmojo
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan tanggung jawab	Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
Rekomendasi kepada Direksi :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana target laba bruto RBB 2024 sebesar Rp. 1,541,949,032, 2. Penyaluran kredit pada sektor sawit dan sepeda motor listrik, 3. Realisasi rencana penerapan SAKEP yang diberlakukan mulai 1 januari 2025, 4. Timeline perubahan nama bank perekonomian rakyat unisritama didalam RUPS, 5. Penambahan petugas posting amprah di kantor kas UIR untuk menjaga layanan posting amprah honor/gaji paling lambat dua hari kerja, 6. Memaksimalkan penerapan program APU PPT PPPSPM, 7. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan umum OJK 2023. 8. Maintenance kredit ke sektor sawit, kunjungan rutin bulanan KUD, mekanisme penjualan hasil kebun, perjanjian jual beli petani ke kud, kud kepada pabrik, dan potensi risiko, 9. Memaksimalkan upaya penghimpunan dana didalam dan diluar captive market, serta insentif penghimpunan dana, 10. Penyusunan action plan penanganan kredit bermasalah, mapping penyebab kredit bermasalah, laporan pemantauan tunggakan secara harian, dan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah secara efektif melalui jasa advokat dan/atau gugatan ke pengadilan, 11. Penyusunan draft serta simulasi skala upah dengan mematuhi UMP terbaru, 12. Pemisahan tugas unit kerja pada fungsi keuangan dan pelayanan, terkait dengan petugas yang melaksanakan penarikan uang (tidak oleh CS), pencegahan fraud pada teller (penutupan akses informasi saldo rekening), dan kebijakan rolling karyawan CS-Teller, 13. Penegasan keputusan rencana perubahan kegiatan usaha dari BPR Unisritama menjadi BPRS Unisritama pada RUPS, 14. Terobosan baru produk simpanan dan kredit, 15. Meningkatkan pemberitahuan kepada seluruh mahasiswa UIR terkait layanan pembayaran uang mahasiswa UIR melalui Bank Unisritama 		

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite BPR tidak memiliki komite.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Tahun 2024		Tahun 2023	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nancy Tahar	Rp 0	0%	Rp 0	0%
2.	Parhan	Rp 0	0%	Rp 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Direksi tidak memiliki saham di BPR.					

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Tahun 2024		Tahun 2023	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rika Puspa Ayu	Rp 0	0%	Rp 0	0%
2.	Eko Atmojo	Rp 0	0%	Rp 0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:					
Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR.					

D. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nancy Tahar	-	-	0%
2.	Parhan	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rika Puspa Ayu	-	-	0%
2.	Eko Atmojo	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
Dewan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain				

E. Hubungan keuangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nancy Tahar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Parhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
tidak ada hubungan keuangan diantara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rika Ayu Puspa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eko Atmojo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
tidak ada hubungan keuangan diantara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham				

4

F. Hubungan Keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nancy Tahar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Parhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Rika Ayu Puspa	Tidak ada	Tidak ada	Imam Ghazali - Suami
2.	Eko Atmojo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut:				
terdapat hubungan keluarga diantara Komisaris Utama (Rika Puspa Ayu) dengan pemegang saham An. Imam Ghazali				

G. Paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	416,100,000	2	208,050,000
2.	Tunjangan	2	69,350,000	2	34,675,000
3.	Tantiem	0	0	0	0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi Lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi			485,450,000		242,725,000
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0	0	0
2.	Transportasi	0	0	0	0
3.	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4.	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
Total fasilitas lain			0		0
Total remunerasi dan fasilitas lain			485,450,000		242,725,000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS pada 20 Maret 2017, dengan besar Honorarium yang diterima oleh Direksi mengacu kepada RUPS pada tanggal 15 Desember 2022. pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memperoleh tantiem dan remunerasi lainnya					

H. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan rasio gaji pegawai yang terendah (b)	2.40
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.20
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.20
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.34
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Penetapan mengenai Honorarium yang diterima oleh Direksi mengacu kepada RUPS PT. BPR Unisritama pada tanggal 15 Desember 2022, sedangkan untuk gaji pegawai ditetapkan melalui SK Direksi No. 23/SK/VII/2024 dan telah sesuai dengan SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.	

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	27/2/2024	4	evaluasi realisasi RBB posisi Februari 2024 dan rekomendasi dewan komisaris
2.	30/5/2024	4	evaluasi kinerja keuangan posisi Mei 2024, rencana penyaluran kredit ke sektor perkebunan kelapa sawit, LDR dan NPL, UMP
3.	29/7/2024	10	evaluasi kinerja keuangan posisi Juni 2024, maintenance kredit sawit, fungsi keuangan dan pelayanan, LDR, NPL, Skala Upah, dan Kredit Sertifikasi existing
4.	5/12/2024	4	RBB 2025, tindak lanjut NPL, Rencana keputusan terkait perubahan kegiatan usaha ke Syariah, dan rekomendasi dewan komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan secara fisik selama tahun periode Januari 2024 s/d Desember 2024 dengan memperhatikan SK Direksi No. 15/SK/VI/2023 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Dewan Komisaris.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Rika Puspa Ayu	4	0	100%
2	Eko Atmojo	4	0	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

seluruh anggota dewan komisaris mendatangi seluruh rapat secara fisik

K. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal *) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

tidak terdapat temuan fraud pada tahun 2024

L. Permasalahan hukum yang dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut :

tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR selama tahun 2024

M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambilan Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
Penjelasan Lebih Lanjut :							
tidak terjadi transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan selama tahun 2024							

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17/1/2024	Sosial	dana bantuan proposal event olahraga penjas	Universitas Islam Riau	250,000
2.	15/2/2024	Sosial	bantuan proposal study banding biru	Universitas Islam Riau	2,000,000
3.	1/3/2024	Sosial	bantuan dana olimpiade MIPA UIR	Universitas Islam Riau	250,000
4.	14/3/2024	Sosial	bantuan dana kegiatan ramadhan Musholla Al-Ikhlas	Musholla Al-Ikhlas	150,000
5.	22/3/2024	Sosial	bantuan proposal ramadhan masjid As-Sajadah	Masjid As-Sajadah	150,000
6.	15/5/2024	Sosial	sumbangan dana seminar internasional	Universitas Islam Riau	500,000
7.	6/6/2024	Sosial	qurban BPR Unisritama Tahun 2024	Masjid Al-Munawwaroh UIR	2,750,000
8.	3/7/2024	Sosial	bantuan dana kegiatan turnamen petanque	Universitas Islam Riau	250,000
9.	13/8/2024	Sosial	bantuan dana perayaan HUT RI ke 79 RT 001	RT001	150,000
10.	15/8/2024	Sosial	bantuan dana untuk TK YLPI Marpoyan	TK YLPI Marpoyan	75,000
11.	11/9/2024	Sosial	dana operasional sponsorship FKIP UIR	Universitas Islam Riau	250,000
12.	19/9/2024	Sosial	program jum'at berkah masjid september 2024	Universitas Islam Riau	250,000
13.	2/10/2024	Sosial	biaya bantuan dana proposal fisipol	Universitas Islam Riau	500,000
14.	16/10/2024	Sosial	bantuan dana field trip biro keuangan UIR	Universitas Islam Riau	1,000,000
15.	15/11/2024	Sosial	bantuan dana proposal harmony FKIP	Universitas Islam Riau	200,000
16.	19/11/2024	Sosial	bantuan dana SMP YLPI Marpoyan	SMP YLPI Marpoyan	200,000
17.	28/11/2024	Sosial	program jum'at berkah oktober dan november 2024	Universitas Islam Riau	500,000

BAB III PENUTUP

Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di PT. Bank Perekonomian Rakyat Unisritama merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Manajemen dalam menjaga integritas, meningkatkan kinerja, dan membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap keberlangsungan usaha Bank.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-assessment) atas penerapan Tata Kelola tahun buku 2024, PT. BPR Unisritama memperoleh **peringkat komposit 3 (cukup baik)**. Peringkat ini mencerminkan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola telah diimplementasikan secara memadai, meskipun masih terdapat kelemahan yang bersifat cukup signifikan dan memerlukan perhatian lanjutan dari Manajemen agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan dan kesehatan Bank.

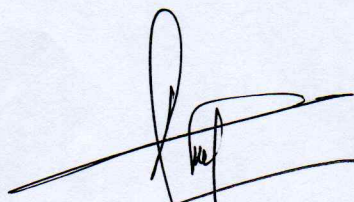
Bank menyadari bahwa pelaksanaan Tata Kelola bukanlah suatu kondisi statis, melainkan proses yang harus terus ditingkatkan seiring dengan perubahan lingkungan usaha, peraturan perundang-undangan, serta ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, PT. BPR Unisritama senantiasa berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal, efektivitas fungsi kepatuhan dan manajemen risiko;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan;
3. Menyempurnakan struktur organisasi dan prosedur kerja sesuai prinsip-prinsip prudensial perbankan;
4. Mendorong budaya kerja yang berlandaskan pada integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab;
5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil audit eksternal maupun internal secara tepat waktu dan efektif.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Bank Unisritama berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tata Kelola sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan berintegritas.

Kampar, 6 Mei 2025

PT. Bank Perekonomian Rakyat Unisritama


Parhan, SE, MM
Direktur




Nancy Tahar, SE
Direktur Utama